

Nama : Qurrotul Aini

Kelas : 2 F

NPM : 2413053192

Mata Kuliah : PKN

Analisis Soal

1. Bagaimanakah tanggapanmu mengenai isi dari berita tersebut? Hal positif apa yang bisa anda ambil dari kejadian tersebut?

Jawab : Berita ini menunjukkan dampak unjuk rasa terhadap penyebaran Covid-19 serta perbedaan perspektif antara pemerintah, mahasiswa, dan masyarakat mengenai UU Cipta Kerja. Di satu sisi, aksi demonstrasi mencerminkan kebebasan berpendapat yang dijamin dalam demokrasi, namun di sisi lain, ada risiko kesehatan yang meningkat akibat pandemi. Hal positif yang bisa diambil:

- Kesadaran akan pentingnya kajian akademis – Mahasiswa didorong untuk melakukan kajian ilmiah terhadap UU Cipta Kerja, bukan hanya turun ke jalan.
- Pentingnya keseimbangan antara hak dan tanggung jawab – Demonstrasi adalah hak, tetapi harus dilakukan dengan memperhatikan kondisi sosial, termasuk protokol kesehatan.
- Peran dialog dalam penyelesaian masalah – Adanya komunikasi antara mahasiswa, pemerintah, dan masyarakat menunjukkan bahwa berbagai aspirasi bisa disampaikan melalui jalur yang lebih aman dan efektif.

2. Bagaimanakah menurut pendapatmu mengenai tata cara mengemukakan pendapat di tempat umum seperti demonstran yang merusak fasilitas umum saat menyampaikan orasinya tetapi merasa tidak bersalah meskipun telah jelas-jelas merusak dan bagaimanakah cara menyalurkan aspirasi yang lebih baik di tengah pandemi covid-19?

Jawab : Menurut pendapat saya demonstrasi adalah bagian dari hak berdemokrasi, tetapi harus dilakukan dengan bertanggung jawab. Ketika demonstran merusak fasilitas umum, hal itu tidak bisa dibenarkan karena justru merugikan masyarakat luas. Fasilitas yang dirusak umumnya dibangun dengan dana publik dan diperuntukkan bagi kepentingan bersama. Selain itu, tindakan anarkis dapat mencoreng tujuan utama demonstrasi serta mengalihkan perhatian dari substansi tuntutan yang ingin disampaikan. Jika demonstran merasa tidak bersalah meskipun telah merusak, itu menunjukkan kurangnya kesadaran akan dampak negatif dari tindakan mereka.

Cara menyalurkan aspirasi yang lebih baik di tengah pandemi Covid-19 :

- Diskusi dan Kajian Akademis – Mahasiswa dan masyarakat dapat melakukan kajian akademis mendalam terkait kebijakan yang diprotes, kemudian menyampaikan hasilnya dalam bentuk makalah, petisi, atau seminar daring yang dapat melibatkan pemerintah dan pakar terkait.
- Audiensi dengan Pihak Berwenang – Mengajukan audiensi langsung dengan DPR, pemerintah, atau lembaga terkait agar aspirasi bisa disampaikan secara resmi tanpa harus turun ke jalan.
- Kampanye Digital – Pemanfaatan media sosial dan platform digital seperti webinar, petisi online, dan diskusi publik dapat menjadi cara efektif untuk menyuarakan pendapat tanpa meningkatkan risiko penularan Covid-19.
- Aksi Simbolis dan Kreatif – Misalnya, dengan memasang poster, mural, atau membuat gerakan sosial yang tetap mematuhi protokol kesehatan.
- Menggunakan Media Massa – Opini dan kritik bisa disampaikan melalui artikel di surat kabar, blog, atau kanal berita yang memiliki jangkauan luas.

Dengan cara-cara ini, aspirasi tetap dapat tersampaikan secara efektif tanpa membahayakan kesehatan masyarakat atau merusak fasilitas umum.

3. Bagaimanakah solusimu mengenai permasalahan benturan kepentingan antara pengusaha dan buruh dalam konteks tetap mengedepankan antara hak dan kewajiban yang seimbang?

Jawab : Benturan kepentingan antara pengusaha dan buruh merupakan persoalan klasik yang perlu diselesaikan dengan pendekatan yang adil dan seimbang. Pengusaha memiliki kepentingan untuk menjaga keberlanjutan bisnis dan keuntungan, sementara buruh memperjuangkan kesejahteraan, hak-hak kerja, dan keamanan sosial mereka. Berikut beberapa solusi yang dapat diupayakan agar kedua pihak mendapatkan hak dan kewajiban yang seimbang:

1. Meningkatkan Dialog Sosial dan Perundingan Bipartit

Pemerintah harus mendorong perundingan antara pengusaha dan serikat pekerja agar terjadi dialog sosial yang konstruktif. Kesepakatan yang dicapai melalui perundingan bersama lebih efektif daripada kebijakan sepihak yang merugikan salah satu pihak.

2. Regulasi yang Berimbang

Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan ketenagakerjaan tidak hanya menguntungkan pengusaha tetapi juga memberikan perlindungan yang cukup bagi buruh. Misalnya:

- Menetapkan aturan fleksibilitas kerja tanpa mengorbankan hak-hak dasar pekerja.
- Menyediakan sistem kompensasi yang adil dalam hal pemutusan hubungan kerja (PHK).

3. Sistem Upah yang Adil dan Berbasis Kinerja

Upah buruh harus mempertimbangkan aspek kesejahteraan dan kelangsungan usaha. Pengusaha bisa menerapkan skema insentif berbasis produktivitas sehingga buruh mendapat penghargaan atas kinerjanya tanpa membebani perusahaan secara berlebihan.

4. Jaminan Sosial yang Memadai

Negara harus memastikan adanya perlindungan sosial bagi buruh, seperti BPJS Ketenagakerjaan, tunjangan hari tua, dan jaminan kesehatan. Ini akan memberikan rasa aman bagi pekerja sekaligus memastikan mereka tetap produktif.

5. Mendorong Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja

Jika lebih banyak lapangan kerja tersedia, daya tawar buruh juga meningkat. Pemerintah perlu mendorong investasi yang menciptakan peluang kerja berkualitas tanpa mengorbankan kesejahteraan pekerja.

6. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Pelatihan dan peningkatan keterampilan buruh harus menjadi prioritas. Dengan tenaga kerja yang lebih terampil, produktivitas meningkat, dan pengusaha lebih bersedia memberikan upah yang lebih tinggi.

4. Jelaskan hal yang perlu diperbaiki dalam rangka menjunjung tinggi hak dan kewajiban antara negara dan warga negara sehingga mewujudkan kehidupan yang harmoni dalam konsep bermasyarakat, berbangsa dan bernegara?

Jawab : Untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, perlu ada keseimbangan antara hak dan kewajiban negara serta warga negara. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperbaiki:

1. **Transparansi dan Partisipasi Publik**
 - Pemerintah harus lebih transparan dalam merumuskan kebijakan dan melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan undang-undang.
 - Perlu ada mekanisme yang lebih jelas untuk menampung aspirasi rakyat sebelum suatu kebijakan disahkan.
2. **Penegakan Hukum yang Adil**
 - Negara harus menjamin kebebasan berpendapat dan hak warga negara untuk menyuarakan aspirasinya sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - Aparat penegak hukum harus bertindak profesional dan tidak represif dalam menangani aksi demonstrasi atau bentuk ekspresi lainnya.
3. **Peningkatan Kesadaran Warga Negara**
 - Warga negara juga memiliki kewajiban untuk memahami dan mematuhi hukum serta menyampaikan aspirasi dengan cara yang tertib dan bertanggung jawab.
 - Pendidikan kewarganegaraan harus diperkuat agar masyarakat lebih memahami hak dan kewajibannya dalam sistem demokrasi.

4. Keseimbangan antara Kepentingan Ekonomi dan Sosial
 - Regulasi yang dibuat pemerintah harus mempertimbangkan kesejahteraan sosial tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi.
 - Hak pekerja harus dilindungi dengan kebijakan yang adil, sementara dunia usaha tetap diberi ruang untuk berkembang.
5. Perlindungan Kesehatan Publik
 - Dalam situasi darurat seperti pandemi, pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan yang dibuat tidak memperburuk keadaan kesehatan masyarakat.
 - Di sisi lain, warga negara juga bertanggung jawab untuk mematuhi protokol kesehatan guna melindungi diri sendiri dan orang lain.

Dengan memperbaiki aspek-aspek tersebut, hubungan antara negara dan warga negara dapat berjalan lebih harmonis, menciptakan stabilitas sosial, politik, dan ekonomi yang berkelanjutan.